



PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN
PERSANDIAN KOTA LHOKSEUMAWE

LKJIP
LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik. LKjIP ini disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap visi, misi, tujuan sasaran dan strategi pencapaian tujuan melalui kebijakan, program dan kegiatan yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Kota Lhokseumawe.

Laporan kinerja ini tentunya masih memiliki kelemahan dan kekurangan sehingga kami sangat berharap adanya saran dan masukan sehingga dapat kami jadikan acuan untuk peningkatan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Kota Lhokseumawe pada masa-masa mendatang.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberi dukungan dalam penyusunan laporan kinerja ini, dan hanya kepada Allah SWT kita berlindung serta senantiasa mendapat petunjuk dan ridha-Nya. *Amin Yaa Rabbal 'Alamiin.*

Lhokseumawe, 27 Februari 2026

Dinas Komunikasi, Informatika Dan
Persandian Kota Lhokseumawe



TARUNA PUTRA SATYA, S.IP, M.A.P

Pembina Tk I

NIP. 19870111 200701 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Gambar	vi
Daftar Grafi	v
Ikhtisar Eksekutif	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Gambaran Umum Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe 2	
1.2.1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Tugas Pokok dan Fungsi	3
1.2.2 Kondisi Pegawai Negeri Sipil	9
1.3. Isu Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe	12
1.4. Landasan Hukum.....	15
1.5 Sistematika Penulisan.....	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	17
2.1 Perencanaan Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe	17
2.1.1 Rencana Strategis.....	18
2.2. Indikator Kinerja Utama	18
2.3. Perjanjian Kinerja.....	19
2.4. Pohon Kinerja	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja.....	23
3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama.....	25
3.3 Analisis Capaian Kinerja Organisasi.....	26
3.4 Analisis Efisiensi.....	35
3.5 Akuntabilitas Keuangan.....	36
BAB IV PENUTUP	44

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
Daftar Grafik	iv
Ikhtisar Eksekutif	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe	2
1.2.1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Tugas Pokok dan Fungsi	3
1.2.2 Kondisi Pegawai Negeri Sipil	9
1.3. Isu Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe	12
1.4. Landasan Hukum	15
1.5 Sistematika Penulisan	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
2.1 Perencanaan Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe	17
2.1.1 Rencana Strategis	18
2.2 Indikator Kinerja Utama	18
2.3 Perjanjian Kinerja	19
2.4 Pohon Kinerja	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja	23
3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama	25
3.3 Analisis Capaian Kinerja Organisasi	26
3.4 Analisis Efisiensi	35
3.5 Akuntabilitas Keuangan	36
BAB IV PENUTUP	44

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Rincian ASN Menurut Jenis Kelamin Tahun 2025.....	8
Tabel 1.2	Rincian ASN Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025	9
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Diklat Jabatan Struktural Per-Desember 2025	10
Tabel 1.4	Jumlah Jabatan Tahun Tabel 2025.....	11
Tabel 1.5	Rincian PNS Menurut Pangkat Tahun 2025	11
Tabel 1.6	Rincian PPPK Menurut Pangkat Tahun 2025	12
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pemko Lhokseumawe Tahun 2023-2026	17
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe Tahun 2025	19
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe Tahun 2025.....	20
Tabel 2.4	Komposisi Belanja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe Tahun 2025	20
Tabel 2.5	Komposisi Belanja Perubahan Pemerintahan Kota Lhokseumawe Tahun 2025	24
Tabel 3.1	Predikat Nilai Capaian Kinerja	24
Tabel 3.2	Kategori Nilai Capaian Kinerja	25
Tabel 3.3	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika dan persandian Kota Lhokseumawe Berdasarkan Predikat Kinerja Tahun 2025	26
Tabel 3.4	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika dan persandian Kota Lhokseumawe Berdasarkan Kategori Kinerja Tahun 2025	28
Tabel 3.5	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 Diskominfo Kota Lhokseumawe Tahun 2025	28
Tabel 3.6	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 Diskominfo Kota Lhokseumawe Tahun 2025.....	30
Tabel 3.7	Nilai IKM Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	35
Tabel 3.8	Tingkat Efisiensi Kinerja dan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe Tahun 2025	35
Tabel 3.9	Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe Tahun 2025	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe	4
Gambar 2.4 Cascading Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe	23

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin.....	9
Grafik 1.2 Jumlah Sumber Daya Manusia Menurut Tingkat Pendidikan	10
Grafik 3.1 Perkembangan Nilai IKM Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe	30

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam mewujudkan *Good Governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang wajib diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya. Dalam konteks kinerja, akuntabilitas mencakup berbagai hal, seperti perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan atau program yang dijalankan.

Selain itu, akuntabilitas juga berhubungan dengan adanya mekanisme untuk mengukur dan menilai sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan efisien dan efektif. Artinya, setiap tindakan yang diambil oleh pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara moral maupun hukum, kepada publik dan pemangku kepentingan lainnya. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama. Berikut pencapaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe:

Capaian Indikator Kinerja Utama

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Kode Warna
Sasaran Strategis : Meningkatnya Informasi Daerah							
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	89,31	85,96	96,25	Tidak Tercapai	
Sasaran Strategis: Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah							
2	Rata-Rata Persentase Pencapaian Program	Persen	100	100	100	Sesuai Target	

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap instansi pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bernegara. Salah satu indikator terwujudnya *good governance* adalah adanya akuntabilitas dan responsibilitas setiap pelaku birokrasi atau lembaga pemerintahannya. Akuntabilitas mempunyai pengertian sebagai suatu konsep etika atau bentuk pertanggungjawaban pemerintah yang memiliki kewenangan dalam mengatur tatanan administrasi publik. Sedangkan responsibilitas mempunyai makna kewajiban moral dalam menyelesaikan tugas yang dipercayakan.

Pengimplementasian konsep akuntabilitas dan responsibilitas telah diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berpedoman pada kedua peraturan tersebut, mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan penggunaan sumberdaya dan kebijaksanaan yang telah dipercayakan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Sejalan dengan itu, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe selaku instansi pemerintah dan unsur Pendukung tugas Walikota

Lhokseumawe dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian perangkat daerah bertanggung jawab untuk menyusun laporan kinerja. LkjIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe Tahun 2025 merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan serta penjabaran dari strategi-strategi yang telah dilaksanakan yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan dalam dokumen jangka menengah (Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian).

1.2 GAMBARAN UMUM DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KOTA LHOKSEUMAWE

1.2.1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja dan Tugas Pokok dan Fungsi

Pembentukan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe pada mulanya ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe.

Sejalan dengan perkembangan dan kepentingan penyesuaian nomenklatur, maka pada tanggal 16 Desember 2024 ditetapkanlah Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 48 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe merupakan Satuan Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe yang bertugas membantu Walikota Lhokseumawe dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan perangkat daerah.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe dipimpin oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe dan bertanggungjawab Walikota Lhokseumawe. Berikut bagan struktur organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe

Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian adalah sebagai berikut:

1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintah dan pembangunan dibidang komunikasi, informatika dan persandian serta statistik sektoral. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- Pengendalian perumusan kebijakan urusan integrasi dan penyebaran informasi, kemitraan dan pengelolaan media publik, aplikasi informatika, pengolahan data, *e-government*, keamanan informasi dan persandian serta statistik sektoral;
- Pelaksanaan kebijakan urusan integrasi dan penyebaran informasi, pengolahan data, *e-government*, keamanan informasi dan persandian serta statistik sektoral;

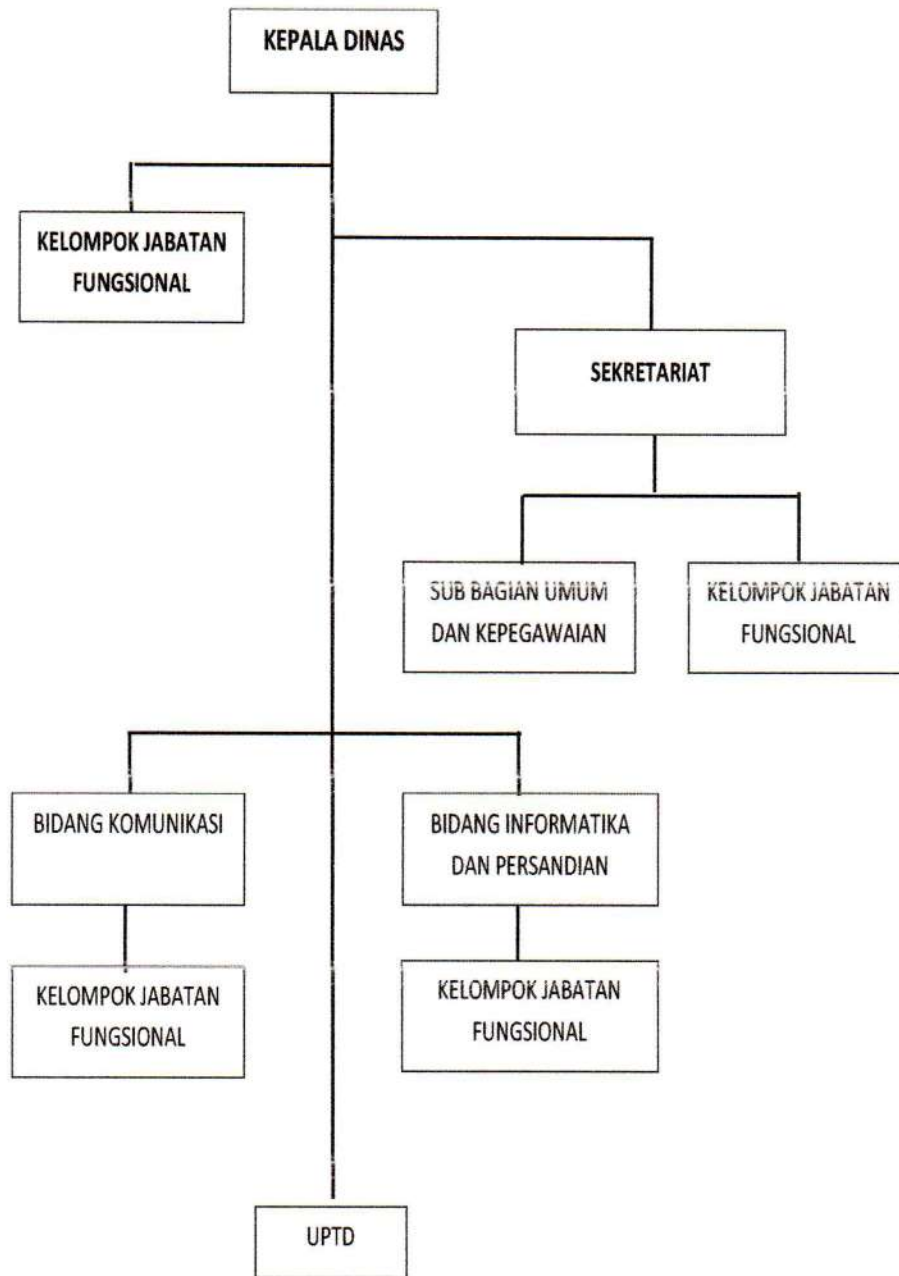
- Pelaksanaan koordinasi urusan integrasi dan penyebaran informasi, pengolahan data, *e-government*, keamanan informasi dan persandian serta statistik sektoral;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan integrasi dan penyebaran informasi, pengolahan data, *e-government*, keamanan informasi dan persandian serta statistik sektoral;
- Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
- Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Wali Kota

2. SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka menyusun rencana program, monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan, menyelenggarakan ketata-usahaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan urusan umum, memberikan pelayanan administrasi kepada semua unit kerja di lingkungan dinas. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretaris mempunyai fungsi:

- Merencanakan perumusan rencana kegiatan dan program kerja Dinas;
- Mengkoordinasikan, mengevaluasi dan menyusun laporan hasil program kerja Dinas;
 - Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang-bidang pada dinas;
 - Mengkoordinasikan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, kehumasan dan keprotolan;
 - Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai;

Gambar 1.1
Struktur Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Kota Lhokseumawe



- Mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan teknis administrasi Kepala Dinas dan semua unit organisasi di lingkungan dinas; dan

- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris dibantu oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Kelompok Jabatan Fungsional meliputi:

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut:

- Menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian lingkungan dinas;
- Menyelenggarakan urusan rumah tangga, rapat-rapat, tamu-tamu dinas dan pelaksanaan kehumasan;
- Menyelenggarakan urusan ketatausahaan, surat menyurat dan kearsipan;
- Menyusun rencana kebutuhan barang, kebutuhan operasional kantor, termasuk inventarisasi barang, pengadaan, perawatan dan pemeliharaan barang perlengkapan dinas;
- Melaksanakan penertiban, pengamanan dan pemeliharaan kebersihan kantor dan lingkungan sekitarnya;
- Menyusun laporan tahunan tentang barang inventarisasi kantor; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidangnya.

2) Kelompok Jabatan Fungsional:

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

3. BIDANG KOMUNIKASI

Bidang Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan persiapan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Komunikasi mempunyai fungsi:

- Perumusan kebijakan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
- Pengorganisasian persiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan

pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;

- Pelaksanaan persiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik; dan
- Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Informatika dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

1) Kelompok Jabatan Fungsional:

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

2) Kelompok Jabatan Fungsional (Pranata Humas)

Pranata Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan.

4. BIDANG INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Bidang Informatika dan Persandian mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan e-government dan pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), pengembangan aplikasi, layanan infrastruktur TIK, layanan keamanan informasi dan persandian. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Informatika dan Persandian mempunyai fungsi:

- Merencanakan dan merumuskan kebijakan bidang tata kelola layanan *e-government*, keamanan, infrastruktur TIK dan persandian serta statistik sektoral;

- Menyelenggarakan pelayanan pengembangan intranet dan pelayanan internet;
- Menyelenggarakan pelayanan sistem komunikasi intra pemerintah kota dan layanan keamanan informasi *e-government*;
- Menyelenggarakan layanan manajemen data dan informasi *e-government* yang aman, efektif dan akuntabel;
- Menyelenggarakan pelayanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi;
- Menyelenggarakan ekosistem TIK *Smart City*;
- Menyelenggarakan pelayanan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat;
- Menyelenggarakan pelayanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan pemerintah kota; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Informatika dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

1) Kelompok Jabatan Fungsional:

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

2) Kelompok Jabatan Fungsional (Manggala)

Jabatan Fungsional Manggala Informatika mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penerapan system Manajemen Keamanan Informasi Manggala Informatika berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional dibidang Sistem Manajemen Keamanan Informasi pada Instansi Pemerintah terdiri atas;

- Tata kelola informasi;
- Manajemen risiko keamanan
- Operasional Keamanan informasi
- Arsitektur keamanan informasi
- Pengembangan system keamanan informasi
- Tanggap darurat keamanan informasi
- Bina kepatuhan dan pemantauan kinerja

- Manajemen pengamanan keberlangsungan layanan teknologi informasi

5. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

1.2.2 Kondisi Aparatur Sipil Negara (ASN)

Sumber daya manusia pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe dapat dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan, latihan jabatan, jenis kelamin dan eselon. Untuk menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi instansi, SDM yang dimiliki Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe cukup beragam. Secara keseluruhan jumlah personil di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Lhokseumawe per desember sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang.

Jumlah pegawai menurut jenis kelamin pada setiap bagian di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Lhokseumawe, dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini:

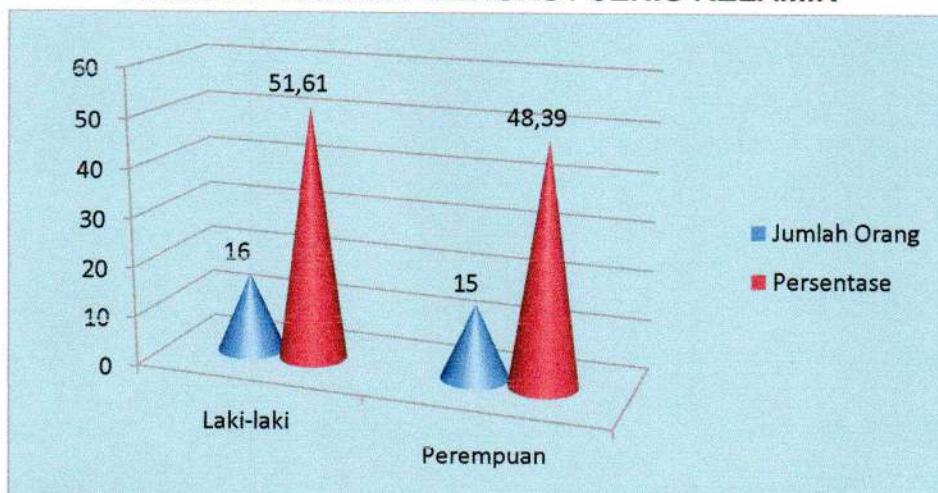
Tabel 1.1
Rincian Pegawai Menurut Jenis Kelamin Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe Tahun 2025

No	Jabatan/bidang/sub bagian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Kepala Dinas	1	-	1
2	Sekretaris	1	-	1
	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	2	5	7
	Kelompok Jabatan Fungsional	2	3	5
3	Bidang Komunikasi dan Kelompok Jabatan Fungsional	4	3	7
4	Bidang Informatika dan Kelompok Jabatan Fungsional	6	4	10
Jumlah		16	15	31

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Diskominfo

Untuk lebih jelasnya komposisi jumlah pegawai menurut jenis kelamin dapat dilihat pada grafik 1.1, dimana jumlah Laki-laki sebanyak 16 orang 51,61%, dan jumlah Perempuan sebanyak 15 orang atau sebesar 48,39%.

Grafik 1.1
JUMLAH PEGAWAI MENURUT JENIS KELAMIN



Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Diskominfo

Tingkat Pendidikan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut ini:

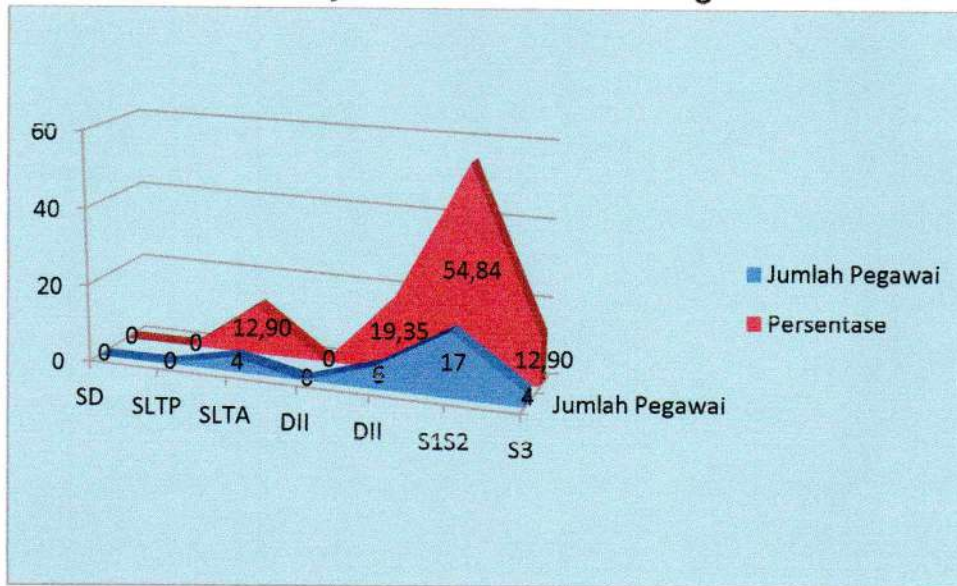
Tabel 1.2
Rincian Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe Tahun 2025

No	Jabatan/Bidang/ Sub Bagian	Pendidikan							
		SD	SLTP	SLTA	DII	DIII	S1	S2	S3
1	Kepala Dinas	-	-	-	-	-	-	1	-
2	Sekretaris	-	-	-	-	-	-	1	-
	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	-	-	3	-	-	4	-	-
	Kelompok Jabatan Fungsional	-	-	1	-	2	1	1	-
3	Bidang Komunikasi dan Kelompok Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-	6	1	-
4	Bidang Informatika dan Kelompok Jabatan Fungsional	-	-	-	-	4	6	-	-
Jumlah		0	0	4	-	6	17	4	0

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Diskominfo

Untuk komposisi tingkat pendidikan, dapat dilihat pada grafik 1.2, dimana jumlah tingkat pendidikan S2 sebanyak 4 orang atau 21,05%, tingkat Pendidikan S1 sebanyak 17 orang atau 54,84 %, tingkat Pendidikan D3 sebanyak 6 orang atau 19,35% tingkat Pendidikan SLTA sebanyak 4 orang atau 12,90 %.

Grafik 1.2
Jumlah Sumber Daya Manusia Menurut Tingkat Pendidikan



Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Diskominfo

Selanjutnya, jumlah pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan jabatan struktural Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut ini :

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Diklat Jabatan Struktural Per- Desember 2025

Diklat	Jumlah
PIM II	0
PIM III	4
PIM IV	0
Total	4

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Diskominfo

Jumlah jabatan di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel 1.4 berikut ini:

Tabel 1.4
Jumlah Jabatan di Lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Kota Lhokseumawe Tahun 2025

No	Jabatan/Bidang/Sub bagian	Eselon							Jumlah
		II.a	II.b	III.a	III.b	III.c	IV.a	IV.b	
1	Kepala Dinas	-	1	-	-	-	-	-	1
2	Sekretaris	-	-	1	-	-	-	-	1
3	Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian	-	-	-	-	-	1	-	1
4	Kepala Bidang	-	-	-	2	-	-	-	2
5	Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	2
6	Pelaksana	-	-	-	-	-	-	-	24
Total		-	1	1	2	-	1	-	31

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Diskominfo

Terdapat jumlah jabatan di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe adalah sebanyak 6 jabatan struktural, dimana eselon II.b sebanyak 0, eselon III.a sebanyak 1 (satu) orang, eselon III.b sebanyak 2 orang, eselon III.c sebanyak 0 orang, dan eselon IV.a sebanyak 1 (satu) orang. Eselon IV.b sebanyak 0 orang. Selanjutnya, rincian pegawai Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe berdasarkan pangkat dapat dilihat pada tabel 1.4 berikut ini:

Tabel 1.5
Rincian PNS Menurut Pangkat Tahun 2025

No	Jabatan/Bidang/Sub bagian	Pangkat/ Golongan			
		I	II	III	IV
1	Kepala Dinas	-	-	-	1
2	Sekretaris	-	-	-	1
3	Sub bagian umum dan kepegawaian	-	1	2	-
4	Kelompok Jabatan Fungsional	-	0	3	-
3	Bidang komunikasi	-	-	4	1
4	Bidang informatika	-	1	2	1
Jumlah		-	3	10	4

Tabel 1.6
Rincian PPPK Menurut Pangkat Tahun 2025

No	Jabatan/Bidang/Sub bagian	Pangkat/ Golongan					
		II	III	V	VII	VIII	IX
1	Sub bagian umum dan kepegawaian	-	-	2	-	-	2
	Kelompok Jabatan Fungsional	-	-	1	-	1	-
2	Bidang komunikasi	-	-	-	-	-	2
3	Bidang informatika	-	-	-	-	3	3
Jumlah		-	-	3	-	4	7

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Diskominfo

Berdasarkan Tabel 1.6 diatas, terdapat jumlah pegawai dengan pangkat/golongan IX sebanyak 7 orang, pangkat/golongan VIII sebanyak 4 orang, pangkat/golongan VII sebanyak 0 orang, pangkat/golongan V sebanyak 3 orang, pangkat/golongan iii sebanyak 0 orang dan pangkat/goiongan i sebanyak 0 orang.

1.3 ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KOTA LHOKSEUMAWE

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Isu strategis daerah dapat dilihat dari RPJMD Kota Lhokseumawe dan Renstra Perangkat Daerah masing-masing, terdapat pula isu strategis internasional, nasional dan daerah Aceh untuk lima tahun mendatang. Adapun Isu-Isu Strategis Internasional meliputi:

1. Globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas;
2. Keterbukaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
3. Pembangunan yang berorientasi pada *Sustainable Development Goals* (SDGs);
4. Sumber energi alternatif; dan
5. Perubahan iklim global;
6. Perangan dagang dan ekonomi Amerika Serikat dan China;

Selanjutnya beberapa Isu Stategis Nasional yang dapat memberi pengaruh antara lain meliputi:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
3. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
4. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
5. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
6. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;
7. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan.

Disamping itu terdapat pula Isu Strategis Daerah Aceh antara lain meliputi:

1. Peningkatan kualitas Demokrasi;
2. Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Tata Laksana dan Sumber Daya Aparatur;
3. Peningkatan Kualitas Penerapan Syariat Islam;
4. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;
5. Pengembangan Kapasitas dan Daya Saing Keolahragaan dan Kepemudaan;
6. Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat;
7. Penurunan Angka Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem;
8. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi;
9. Pengembangan Kemitraan dan Peningkatan Sumber Pendanaan Pembangunan;
10. Optimalisasi Kemandirian Pangan;
11. Penciptaan Lapangan Kerja dan Penurunan Pengangguran;
12. Pengurangan Ketimpangan Antar Wilayah melalui Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Strategis;
13. Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Pelestarian Hutan dan Penanganan Bencana
14. Penguatan Perdamaian secara Berkelanjutan.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026 ditetapkan Isu Strategis yang mendukung pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026 sebagai berikut:

1. Reformasi Birokrasi;
2. Peningkatan Kualitas Demokrasi;

3. Peningkatan Pelaksanaan Nilai-nilai Dinul Islam;
4. Peningkatan Kualitas SDM;
5. Peningkatan Kualitas Kesehatan;
6. Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Pertumbuhan Ekonomi;
8. Pemenuhan Infrastruktur Dasar untuk peningkatan kualitas hidup;
9. Pengembangan Kemitraan dan Peningkatan Sumber Pendanaan Pembangunan.

Berdasarkan uraian diatas, ditentukan isu-isu strategis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe. Isu-isu strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe antara lain:

1. Pengembangan data center yang menjadi pusat data Pemerintah Kota Lhokseumawe;
2. Pengembangan dan penguatan infrastruktur jaringan internet dan intranet Pemerintah Kota Lhokseumawe;
3. Pengembangan implementasi e-Government Pemerintah Kota Lhokseumawe;
4. Pengembangan penyediaan layanan informasi website online;
5. Pengembangan jaringan komunikasi data yang aman;
6. Pembentukan kelompok informasi masyarakat guna penyebaran penyediaan dan pemanfaatan informasi, yang dilaksanakan oleh pemerintah secara aktif, mengumpulkan informasi yang bermanfaat untuk dapat diakses oleh masyarakat yang secara aktif dapat menggali, mengolah dan menyebarkan informasi secara bertanggungjawab;
7. Ketersediaan layanan informasi publik yang berkualitas yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan cepat;
8. Penyelenggaraan Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran yang efektif dan efisien dengan menggunakan sumberdaya seoptimal mungkin, memenuhi standar kualitas layanan prima;
9. Pengembangan sumber daya aparatur dilingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe yang menguasai teknologi informasi;

1.4 LANDASAN HUKUM

LKjIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026;
8. Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 509 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 115 Tahun 2018 Tentang Penetapan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian LKjIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota

Lhokseumawe dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Latar Belakang, Gambaran Umum Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Lhokseumawe, Isu Strategis yang dihadapi, Landasan Hukum dan Sistematika Penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategik Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe dan Perjanjian Kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Kerangka Pengukuran, Capaian Indikator Kinerja Utama, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis dan Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KOTA LHOKSEUMAWE

2.1.1 Rencana Strategis

Perencanaan strategis adalah proses sistematis untuk menentukan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan suatu organisasi dalam jangka menengah. Proses ini bertujuan untuk mengarahkan organisasi agar dapat mencapai hasil yang diinginkan melalui langkah-langkah yang terencana, efisien, dan berorientasi pada hasil.

Perencanaan strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe lebih mengarah kepada peran strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe (sebagai unit kerja) dalam usaha mencapai tujuan pembangunan Kota Lhokseumawe tahun 2023-2026. Pendekatan ini merupakan komitmen Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe untuk memastikan arah kebijakan yang akan diambil bersifat konsisten dan terukur sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.

Berikut rumusan perencanaan strategis Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026 yang diampu oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe, yaitu:

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Peningkatan penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik	Menyediakan database pemerintahan dan peningkatan informasi public

Sumber: DPA- Diskominfo Kota Lhokseumawe Tahun 2025

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran strategis telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam indikator kinerja. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan visi, misi dan tujuan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe yang telah ditetapkan.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Informasi Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Hasil Penilaian IKM dari Bagian Organisasi
		Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Rata-rata Persentase Pencapaian Program	Persen	(Jumlah indikator program OPD yang mencapai target / Jumlah indikator program OPD) x 100

Sumber: DPA-Diskominfo Kota Lhokseumawe Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 2.2 diatas, terdapat 2 (dua) indikator kinerja utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe dalam pencapaian kinerja, yaitu: 1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); dan 2) Rata-rata Persentase Pencapaian Program.

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan/komitmen/kesepakatan antara atasan dengan bawahan untuk mencapai kinerja yang terukur pada suatu periode tahun tertentu. Perjanjian kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan yang sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan dikarenakan terkait wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026, dimana terakhir diubah melalui SK Walikota Lhokseumawe Nomor 241 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 272 Tahun 2023 tentang Penetapan Perubahan Indikator dan Target Kinerja Program, Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah pada Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe telah menetapkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Informasi Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A (89,31)
2	Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Rata-rata Persentase Pencapaian Program	100%

Sumber: DPA- Diskominfo Kota Lhokseumawe Tahun 2025

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota

Lhokseumawe, maka besaran anggaran Tahun 2025 yang direncanakan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Komposisi Belanja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Kota Lhokseumawe Tahun 2025

Uraian	Anggaran Belanja (Rp)
Belanja	6.422.996.749,00
Belanja Operasi	5.676.746.749,00
Belanja Pegawai	2.036.723.473,00
Belanja Barang dan Jasa	3.640.023.276,00
Belanja Modal	746.250.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	746.250.000,00
Jumlah	6.422.996.749,00

Sumber: DPA- Diskominfo Kota Lhokseumawe Tahun 2025

Pelaksanaan seluruh program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pemerintah Kota Lhokseumawe seperti yang telah diperjanjikan di dalam dokumen perjanjian kinerja untuk belanja langsung dan belanja tidak langsung pada ABPK Tahun 2025 dengan jumlah anggaran sebesar Rp6.422.996.749,00. Untuk pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang telah diperjanjikan untuk mewujudkan target kinerja pada perjanjian kinerja perubahan Anggaran belanja pada APBK Perubahan Tahun 2025 sebesar Rp5.783.710.714,00, dengan rincian perubahan sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Komposisi Belanja Perubahan Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2025

Uraian	Anggaran Belanja (Rp)
Belanja	
Belanja Operasi	Rp5.024.960.714,00
Belanja Pegawai	Rp2.221.193.000,00
Belanja Barang dan Jasa	Rp2.803.767.714,00
Belanja Modal	Rp758.750.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp758.750.000,00
Jumlah Belanja Daerah	Rp5.783.710.714,00

Sumber: DPPA- Diskominfo Kota Lhokseumawe Tahun 2025

2.4 POHON KINERJA

Pohon Kinerja (Cascading) adalah penjabaran kinerja dan indikator kinerja yang lebih terperinci atau kondisi-kondisi yang mempengaruhinya dengan menggunakan kerangka logis. Berikut Pohon Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe :

PEMETAAN KINERJA/KERANGKA LOGIS

RPK LHKSEUMAWE 2023 - 2026

TUJUAN - 1 (FOKUS SASARAN 1-2)

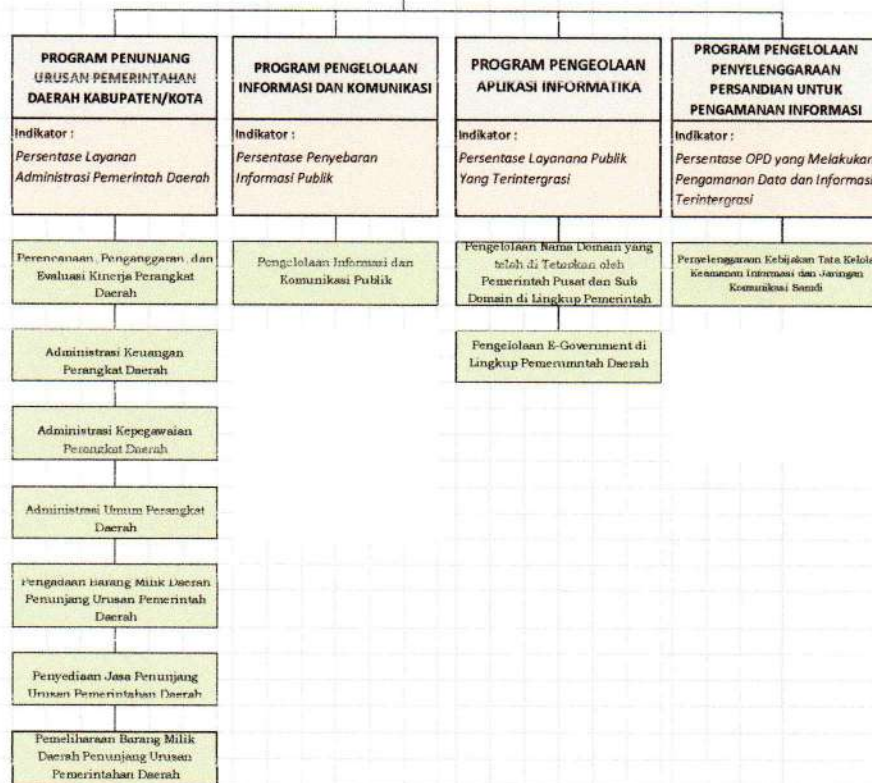
ISU STRATEGIS
Reformasi Birokrasi;
Pemilihan Umum dan Pilkada Serentak 2024;
Pengembangan Kemitraan dan Peningkatan -
Sumber Pendanaan Pembangunan.

TUJUAN-1
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Indikator :
Indeks Reformasi Birokrasi

SASARAN 1-2
Meningkatnya Pelayanan Publik
Indikator :
Persentase Perangkat Daerah dengan
Nilai "IKM" yang Baik

STRATEGI 1.2.1
Meningkatkan sistem pelayanan
STRATEGI 1.2.1
Meningkatkan sistem pelayanan publik

KEBIJAKAN 1.2.1.1
Meningkatkan manajemen pelayanan publik



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan gambaran mengenai pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai wujud kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi Dinas Komunikasi Informatika, dan Persendian Kota Lhokseumawe selaku instansi pemerintah yang mengemban amanah, melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi Informatika, dan Persendian Kota Lhokseumawe yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2023-2026. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang ditetapkan.

3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja Sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian kinerja, perlu memperhatikan karakteristik realisasi dengan kondisi:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

Untuk mempermudah penginterpretasian tingkat pencapaian kinerja, maka ditetapkan kategori pencapaian kinerja kedalam 4 (empat) kategori, yaitu:

Tabel 3.1
Predikat Nilai Capaian Kinerja

No	Persentase	Predikat	Kode Warna
1	<100%	Tidak Tercapai	Merah
2	=100%	Tercapai/ Sesuai Target	Hijau
3	>100%	Melebihi Target	Kuning

Sedangkan untuk penginterpretasian kategori nilai capaian kinerja dilakukan melalui pendekatan skala nilai peringkat kinerja yang termuat dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu:

Tabel 3.2
Kategori Nilai Capaian Kinerja

No	Rata-Rata Capaian	Kategori	Kode Warna
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	Kuning
2	76% ≤ 90%	Tinggi	Hijau
3	66% ≤ 75%	Sedang	Biru
4	51% ≤ 65%	Rendah	Merah Muda
5	≤ 50%	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Diskominfo Kota Lhokseumawe Tahun 2025

Selanjutnya, berdasarkan hasil pengukuran kinerja dilakukan analisis-analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

3.2 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Analisis yang dilakukan dalam Laporan kinerja ini merujuk format penyusunan sesuai dengan ketentuan Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014, yaitu:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (target tahun akhir) yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau penyebab peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan
- Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja.

Berikut analisis capaian kinerja untuk setiap sasaran strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe:

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Kode Warna
Sasaran Strategis : Meningkatkan Informasi Daerah							
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	89,31	85,96	96,25	Tidak Tercapai	
Sasaran Strategis: Meningkatkan layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah							
2	Rata-Rata Persentase Pencapaian Program	Persen	100	100	100	Sesuai Target	

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe

Berdasarkan Tabel 3.3 diatas, hasil pengukuran capaian IKU Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe menggunakan skala pengukuran ordinal, untuk 2 (dua) IKU menunjukkan hasil dengan predikat **Tidak Tercapai**.

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe Berdasarkan Kategori Kinerja Tahun 2025

No	IKU	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Kode Warna
Sasaran Strategis: Meningkatnya informasi daerah							
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	89.31	85,96	96,25	Sangat Tinggi	
Sasaran Strategis: Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah							
2	Rata-Rata Persentase Pencapaian Program	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi	
Capaian IKU Tahun 2025 (%)					85,63	Tinggi	

Sumber: Data capaian Realisasi IKU, IKU PD, IKD Tahun Anggaran 2025

Berdasarkan pada Tabel 3.4 diatas, Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) menunjukkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan kategori **Sangat Tinggi**, untuk Rata-Rata Persentase Pencapaian Program dengan kategori **Sedang** sehingga capaian IKU Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe Tahun 2025 sebesar **85,63%** dengan kategori **Tinggi**.

3.3 ANALISIS CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Analisis yang dilakukan dalam Laporan kinerja ini merujuk format penyusunan sesuai dengan ketentuan Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014, yaitu:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

Indikator Program Informasi dan Komunikasi Publik Tahun 2025 sebesar 263,08% dengan kategori **Melebihi Target**.

3) Indikator Program Aplikasi Informatika:

Persentase Pelayanan Publik Yang Terintegrasi:

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah OPD yang Terintegrasi}}{\text{Jumlah Seluruh OPD}} \times 100\% \\ &= \frac{34}{34} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

4) Indikator Program Penyelenggaraan Persandian:

Persentase OPD yang melakukan pengamanan data dan informasi terintegrasi:

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah OPD yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi}}{\text{Jumlah Seluruh OPD}} \times 100\% \\ &= \frac{34}{34} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

Maka, capaian tahun 2025 atas IKU: Rata-Rata Persentase Pencapaian Program adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah Indikator Program OPD yang Mencapai Target}}{\text{Jumlah Indikator Program OPD}} \times 100\% \\ &= \frac{4}{4} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

Berikut analisis capaian kinerja (Merujuk kepada Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014) atas IKU: Rata-Rata Persentase Pencapaian Program:

- *Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.*

Realisasi kinerja atas IKU: Rata-Rata Persentase Pencapaian Program pada tahun 2025 memperoleh nilai persentase sebesar 100%. Nilai ini sudah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%. Artinya, capaian kinerja tahun 2025 adalah sebesar **100%** (**Kategori Kinerja: Sangat Tinggi; Predikat: Tercapai**).

- *Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.*

- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (target tahun akhir) yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau penyebab peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan
- Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja.

Berikut analisis capaian kinerja untuk setiap sasaran strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe:

SASARAN STRATEGIS 1 MENINGKATNYA INFORMASI DAERAH

Kebijakan pemerintah merupakan serangkaian keputusan dan tindakan strategis yang diambil oleh suatu unit kerja pemerintah untuk mencapai tujuan. Sedangkan kualitas kebijakan merujuk kepada seberapa efektif, efisien, relevan, inklusif, dan berkelanjutan kebijakan tersebut dalam menjawab kebutuhan pengguna.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe selaku instansi pemerintah dan unsur pendukung tugas Wali Kota Lhokseumawe dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian perangkat daerah, telah melakukan berbagai kebijakan dan tindakan strategis dalam memenuhi kebutuhan pengguna layanan. Upaya ini bertujuan untuk memberikan sumbangsih kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Oleh karena itu, indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis 1 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.5
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe Tahun 2025

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Informasi Daerah					
No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	A 89,31	B 85,96	96,25

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe

Tabel 3.6
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Rata-rata persentase pencapaian program pada masing-masing perangkat	Persen	100	75	75

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Pelayanan Publik diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Kota Lhokseumawe, maka perlu diselenggarakan survei tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM

yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

SKM merupakan suatu survei yang disusun berdasarkan indikator-indikator unsur pelayanan dalam suatu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Unsur-unsur pelayanan publik yang menjadi kriteria pelayanan adalah:

1. Persyaratan;
2. Prosedur;
3. Biaya/Tarif
4. Waktu Pelayanan;
5. Produk Pelayanan;
6. Kompetensi Pelaksana;
7. Perilaku Pelaksana;
8. Sarana dan Prasarana; dan
9. Penanganan pengaduan.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat terkait pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Selain hal tersebut, IKM berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe. Dalam hal ini, pengguna layanan publik yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Kota Lhokseumawe.

Berikut analisis capaian kinerja (Merujuk kepada PermenpanRB Nomor 53 Tahun 2014) atas IKU: Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat:

- *Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.*

Realisasi kinerja atas IKU: Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2025 memperoleh nilai sebesar **B (85,96)**. Nilai ini belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar **A (89,31)**. Artinya, capaian kinerja tahun 2025 adalah sebesar **96,25% (Kategori Capaian: Sangat Tinggi; Predikat: Tidak Mencapai Target)**.

- *Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.*

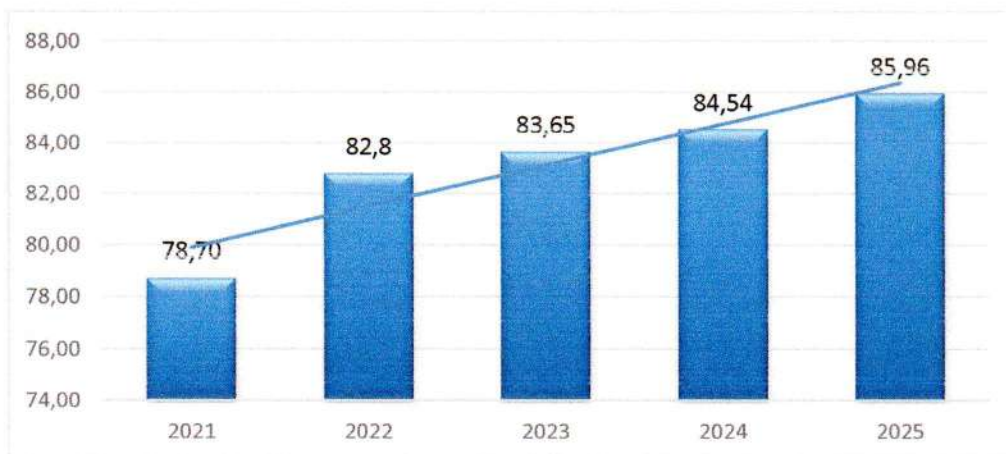
Capaian indeks kepuasan masyarakat tahun 2024 memperoleh nilai sebesar 95,19% dan tahun 2025 sebesar 96,25% dari capaian tersebut menunjukkan bahwa adanya peningkatan sebesar 1,06%.

Tabel 3.7
Nilai IKM Dinas komunikasi, Informatika dan persendian Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

Tahun	Target	Realiasi	Capaian Kinerja (%)
2021	-	78,7	-
2022	-	82.80	-
2023	88,31	83.65	94,72
2024	88,81	84,54	95,19
2025	89,31	85,96	96,25

Sumber: Diskominfo Kota Lhokseumawe

Grafik 3.1
Perkembangan Nilai IKM Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe Tahun 2025 Tahun 2021-2025



Sumber: Diskominfo Kota Lhokseumawe

Berdasarkan data diatas, pada tahun 2021 dan 2022 tidak dimunculkan target karena IKU tersebut tidak menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe.

- *Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (target tahun akhir) yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.*

Target nilai akhir yang harus dicapai pada tahun 2026 adalah A (89,81) Artinya, untuk mencapai target tersebut dibutuhkan 3,85 poin lagi bila dibandingkan dengan realisasi kinerja Tahun 2025.

- *Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau penyebab peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.*

Indek Kepuasan Masyarakat memperoleh nilai **B** dan realisasi kinerja IKU **tidak tercapai** target yang telah ditetapkan. Unsur pelayanan yang termasuk dua unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu waktu penyelesaian layanan, persyaratan layanan, serta sarana dan prasarana layanan, tindak lanjut berikutnya Peningkatan SDM, Monitoring dan Evaluasi terhadap persyaratan dan pelayanan dan tidak terkesan Birokratis, dan perlu peningkatan sarana dan prasarana secara optimal untuk menunjang pelayanan.

- *Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja.*

Adapun program yang menunjang keberhasilannya adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Aplikasi Informatika, Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi, serta Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, dengan total anggaran sebesar Rp5.783.710.714,00 dan terealisasi sebesar Rp5.217.002.737,00 atau capaian kinerja anggaran sebesar 90,20%.

SASARAN STRAEGIS 2

MENINGKATNYA LAYANAN PENCAPAIAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah (PD) mencerminkan sejauh mana perangkat daerah dapat mengimplementasikan semua rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan guna mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah daerah secara keseluruhan. Sasaran strategis ini diukur

menggunakan indikator kinerja: Rata-Rata Persentase Pencapaian Program pada Perangkat Daerah

1. RATA-RATA PERSENTASE PENCAPAIAN PROGRAM PADA PERANGKAT DAERAH

Rata-rata persentase pencapaian program pada perangkat daerah adalah indikator penting untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program yang direncanakan. Berikut langkah-langkah menghitung rata-rata persentase pencapaian tersebut:

$$\frac{\text{Jumlah Indikator Program OPD yang Mencapai Target}}{\text{Jumlah Indikator Program OPD}} \times 100\%$$

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025, bahwa Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe mempunyai 4 Program untuk mencapai visi dan misi pembangunan daerah Kota Lhokseumawe, yaitu: 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; 2) Program Informasi dan Komunikasi Publik; dan 3) Program Aplikasi Informatika. 4) Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Berikut pengukuran untuk Tahun 2025 atas keempat indikator program tersebut:

- 1) Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah diukur melalui:

Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah:

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah Dokumen Adm. Pemerintah yang dilaksanakan}}{\text{jumlah dokumen yang harus tersedia}} \times 100\% \\ &= \frac{6}{6} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

- 2) Indikator Program Informasi dan Komunikasi Publik:

Persentase Penyebaran Informasi Publik:

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah Informasi Publik yang Tercatat}}{\text{Jumlah Informasi Publik yang Tersedia}} \times 100\% \\ &= \frac{171}{190} \times 100\% = 90\% \end{aligned}$$

Berdasarkan realisasi indikator Program Informasi dan Komunikasi Publik Tahun 2025 yaitu 90%, dengan target yang ditetapkan yaitu 34,21%, dimana realisasi melebihi dari target yang telah ditetapkan, sehingga capaian

Pada Tahun 2024 dengan capaian kinerja 75%, pada tahun 2025 capaian kinerja 100%, dimana adanya peningkatan sebesar 25%. Hal ini mencerminkan konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe, meskipun masih diperlukan upaya peningkatan kinerja melalui penguatan koordinasi dan penyempurnaan perencanaan agar capaian kinerja pada tahun berikutnya.

- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (target tahun akhir) yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Realisasi kinerja atas IKU: Rata-Rata Persentase Pencapaian Program pada tahun 2025 adalah sebesar 100%. Sementara, target tahun akhir (2026) yang harus dicapai adalah sebesar 100%. Artinya, sudah mencapai target. Dengan kata lain, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe konsisten melaksanakan seluruh program agar mencapai target yang telah ditetapkan.

- *Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau penyebab peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.*

Realisasi kinerja IKU: Rata-Rata Persentase Pencapaian Program tahun 2025 sudah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan formula indikator diatas Program Informasi dan Komunikasi Publik yang sudah mencapai target 100%. Artinya sudah mencapai target akhir.

- *Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja.*

Adapun program yang menunjang keberhasilannya adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Aplikasi Informatika dan Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dengan total anggaran sebesar Rp5.783.710.714,00 dan terealisasi sebesar Rp5.217.002.737,00 atau capaian kinerja anggaran sebesar 90,20%.

3.4 ANALISIS EFISIENSI

Efisiensi memiliki keterkaitan erat dengan produktivitas, yakni berfokus pada penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil tertentu. Efisiensi menekankan pada upaya untuk meminimalkan input (anggaran) sambil mempertahankan atau

meningkatkan output (kinerja). Sebuah proses dianggap efisien jika hasil kerja dapat dicapai dengan menggunakan anggaran seminimal mungkin, tanpa mengurangi kualitas kinerja yang dihasilkan. Rumus dasar untuk mengukur tingkat efisiensi adalah:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{\text{Capaian Kinerja yang Dihasilkan (Output)}}{\text{Capain Anggaran yang Digunakan (Input)}} \times 100\%$$

Interpretasi:

Rentang Efisiensi (%)	Kategori	Interpretasi
81 - >100%	Sangat Efisien	Anggaran digunakan secara optimal, hampir tanpa pemborosan, dan target kinerja tercapai atau terlampaui.
61 - 80%	Efisien	Kinerja cukup baik, dengan sedikit pemborosan dalam penggunaan anggaran.
41 - 60%	Cukup Efisien	Terdapat pemborosan yang signifikan, namun masih dalam batas yang dapat ditoleransi.
21 - 40%	Kurang Efisien	Anggaran tidak dimanfaatkan secara maksimal; perlu perbaikan kinerja secara signifikan.
<0 - 20%	Tidak Efisien	Kinerja sangat buruk, dengan tingkat pemborosan tinggi; sistem perlu evaluasi mendalam.

Berikut tingkat efisiensi atas masing-masing indikator kinerja sasaran strategis pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe:

Tabel 3.8
Tingkat Efisiensi Kinerja dan Anggaran
Kota Lhokseumawe Tahun 2025

No	IKU	Satuan	Target	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran (%)	Efesiensi (%)
Sasaran Strategis: Meningkatnya informasi daerah						
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	89.31	96,25	90,20	106,71
Sasaran Strategis: Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah						
2	Rata-Rata Persentase Pencapaian Program	Persen	100	100	90,20	110,87

Berdasarkan Tabel 3.9 diatas, analisis efisiensi terhadap sasaran strategis yang diukur melalui 2 (dua) IKU Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe adalah sebagai berikut:

1. IKU: Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menunjukkan tingkat efisiensi sebesar 106,71% (Sangat Efisien); dan
2. IKU: Rata-Rata Persentase Pencapaian Program PD menunjukkan tingkat efisiensi sebesar 110,87% (Sangat Efisien).

Selanjutnya, berdasarkan rentang efisiensi tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe akan melakukan evaluasi cepat dan tindak lanjut yang tepat agar tingkat efisiensi kinerja pada tahun-tahun mendatang mendapatkan nilai yang lebih baik.

3.5 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas keuangan berkaitan dengan tanggung jawab Kominfo Lhokseumawe dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran atau sumber daya yang telah diberikan. Tujuan utama dari akuntabilitas keuangan adalah untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikut rincian program/kegiatan, pagu dan realisasi anggaran terkait pencapaian target kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe pada tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.9
Pagu dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe Tahun 2025

KODE REKENING	SK/PK/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN		REALISASI		CAPAIAN
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5	5	
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	5.783.710.714	5.217.002.737		90,20	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.715.066.436	2.206.530.667		81,27	
2.16.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	154.445.518	54.143.592		35,06	
2.16.01.2.01.0001	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	154.445.518	54.143.592		35,06	
2.16.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.221.193.000	1.826.002.993		82,21	
2.16.01.2.02.0001	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.221.193.000	1.826.002.993		82,21	
2.16.01.2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	7.500.000	7.443.100		99,24	
2.16.01.2.05.0009	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	7.500.000	7.443.100		99,24	
2.16.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	62.000.001	61.943.483		99,91	

KODE REKENING	SKPK/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN		REALISASI		CAPAIAN
		(Rp.)		(Rp.)	(%)	
1	2	3		4	5	
2.16.01.2.06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	8.000.001		7.955.557	99,44	
2.16.01.2.06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	7.000.000		6.990.000	99,86	
2.16.01.2.06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	3.000.000		2.997.926	99,93	
2.16.01.2.06.0009	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	44.000.000		44.000.000	100,00	
2.16.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	198.637.917		185.835.999	93,56	
2.16.01.2.08.0001	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	3.726.000		3.713.294	99,66	
2.16.01.2.08.0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	59.045.437		48.717.032	82,51	
2.16.01.2.08.0003	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	8.000.000		7.855.833	98,20	
2.16.01.2.08.04	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	127.866.480		125.549.840	98,19	
2.16.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	71.290.000		71.161.500	99,82	
2.16.01.2.09.0001	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	27.280.000		27.195.800	99,69	

KODE REKENING	SK/PK/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN		REALISASI		CAPAIAN
		(Rp.)		(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5		
2.16.01.2.09.02	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	28.300.000	28.259.700		99,86	
2.16.01.2.09.10	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	15.710.000	15.706.000		99,97	
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.977.339.000	1.921.281.202		97,16	
2.16.02.2.01	PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.977.339.000	1.921.281.202		97,16	
2.16.02.2.01.0021	PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK	1.912.870.000	1.865.388.800		97,52	
2.16.02.2.01.0019	MONITORING INFORMASI KEBIJAKAN, OPINI, DAN ASPIRASI PUBLIK	13.239.000	12.517.600		94,55	
2.16.02.2.01.0017	PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	51.230.000	43.374.802		84,67	
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1.066.190.000	1.064.119.226		99,81	
2.16.03.2.01	PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.150.000	10.150.000		100,00	

KODE REKENING	SK/PK/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN		REALISASI		CAPAIAN
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5		
2.16.03.2.01.0004	PENGELOLAAN NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DAN PENGELOLAAN NAMA DOMAIN PEMERINTAH DESA	10.150.000	10.150.000		100,00	
2.16.03.2.02	PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.056.040.000	1.053.969.226		99,80	
2.16.03.2.02.0024	PENYELENGGARAAN JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	1.000.000.000	999.899.424		99,99	
2.16.03.2.02.0021	PENYELENGGARAAN SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN PEMERINTAH DAERAH	21.580.000	20.120.000		93,23	
2.16.03.2.02.0017	KOORDINASI PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI	19.390.000	18.879.802		97,37	
2.16.03.2.02.0025	KOORDINASI PEMANFAATAN PORTAL PELAYANAN PEMERINTAH DAERAH YANG TERINTEGRASI	15.070.000	15.070.000		100,00	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	25.115.278	25.071.642		99,83	
2.21.02.2.01	PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.115.278	25.071.642		99,83	
KODE REKENING	SK/PK/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN

		(Rp.)	(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5
2.21.02.2.01.01	PENETAPAN KEBIJAKAN TATA KELOLA KEAMANAN INFORMASI DAN JARING KOMUNIKASI SANDI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.326.278	13.291.642	99,74
2.21.02.2.01.04	PENYEDIAAN LAYANAN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.789.000	11.780.000	99,92
Total		5.783.710.714	5.217.002.737	90,20

Berdasarkan Tabel 3.10 diatas, untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi serta mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe, dilakukan penganggaran melalui DPA-Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe dengan total anggaran sebesar Rp5.783.710.714,00 sedangkan realisasi anggarannya mencapai Rp5.217.002.737,00 atau serapan anggaran sebesar 90,20%. Dengan demikian dapat diketahui pada tahun 2025 kondisi anggaran Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) adalah sebesar 9,80%.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe Tahun 2025 menyajikan gambaran kinerja berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis. Gambaran kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe diukur melalui 2 (dua) Indikator Kinerja Utama, yaitu: 1) Indeks Kepuasan Masyarakat; dan 2) Rata-Rata Persentase Pencapaian Program Perangkat Daerah.

Berdasarkan hasil pengukuran dan analisis yang telah disajikan, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe memang belum berhasil mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, namun capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe masih berada pada kategori kinerja yang tinggi (85,63). Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang.

Akhir kata, dengan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe Tahun 2025, diharapkan dapat terwujud transparansi dan mendorong penyelenggaraan pemerintahan sesuai prinsip *good governance*.

Lhokseumawe,
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika
dan Persandian Kota Lhokseumawe,



TARUNA PUTRA SATYA, S.IP, M.A.P
Pembina Tingkat 1
NIP. 198701112007011003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KOTA LHOKSEUMAWE

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Informasi Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A (89,31)
2	Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Rata-rata Persentase Pencapaian Program pada Masing-Masing Perangkat Daerah	100%

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.427.996.749,-	-
2.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunitas Publik	Rp. 2.850.000.000	-
3.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp. 1.105.000.000	-
4.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp. 40.000.000	-

Pj. WALI KOTA LHOKSEUMAWE



A. HANAN, SP., MM

Lhokseumawe, 20 Januari 2025
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN PERSANDIAN
Kota Lhokseumawe



TAUFIK, S.Sos.,MSP
Pembina Utama Muda
NIP. 19650812 198708 1 001